

ABSTRAK

Pada *status quo*, amat mudahnya syarat permohonan pailit di Indonesia membuat kreditur maupun debitur yang beritikad tidak baik mudah mengajukan permohonan pailit. Di samping itu, definisi pailit dan parameter batas minimum jumlah utang belumlah jelas. Pun sampai saat ini, belum ada mekanisme yang pasti untuk membuktikan ketidaksanggupan debitur dalam melunasi utangnya. Sehingga, masalah ini pun berimplikasi pada resiko mudahnya bangkrut secara hukum bagi debitur bahkan jika debitur tersebut masih dalam kondisi solven dan beritikad baik. Hal inilah yang menjadikan kesehatan keuangan, jumlah harta kekayaan, dan itikad baik debitur perlu dipertimbangkan melalui mekanisme *Insolvency Test* agar tidak merugikan debitur yang masih dalam keadaan keuangan yang baik serta memiliki itikad baik. Problematika yang dianalisis ialah berkenaan dengan perlindungan hukum bagi debitur yang masih solven dan beritikad baik yang belum terakomodir secara maksimal. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlu dilakukan revisi atau pembaharuan pada Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UU KPKPU) dengan memasukkan metode *Insolvency Test* sebagai upaya pembuktian atas kesehatan keuangan dan itikad baik debitur. Hal tersebut memiliki urgensi untuk mewujudkan progresivitas, keadilan, serta kepastian hukum bagi para pihak khususnya bagi debitur, agar debitur yang masih memiliki kondisi keuangan dan itikad yang baik dapat terselamatkan dari penjatuhan pailit.

Kata kunci: Pailit, Syarat Pailit, *Insolvency Test*.

ABSTRACT

In the status quo, it is very easy for the requirements for bankruptcy applications in Indonesia to make it easy for creditors and debtors with bad intentions to apply for bankruptcy. In addition, the definition of bankruptcy and the parameters for the minimum amount of debt are not clear. Even until now, there is no definite mechanism to prove the debtor's inability to repay their debts. Thus, this problem also has implications for the easy risk of legally going bankrupt for debtors even if the debtor is still in a solvent condition and has good faith. This is what makes the financial health, total assets, and good faith of debtors need to be considered through the Insolvency Test mechanism so as not to harm debtors who are still in good financial condition and have good faith. Then, the problem being analyzed is related to legal protection for debtors who are still solvent and in good faith who have not been accommodated optimally. The type of research used in this study is a type of normative legal research with statute and conceptual approaches. The data source used is secondary data with primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this study indicate that revision or renewal of Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment Obligation (Bankruptcy Law) is necessary by including the Insolvency Test method as an attempt to prove the debtor's financial health and good faith. This has the urgency to embody progressivity, justice, and legal certainty for the parties, especially for debtors, so that debtors who still have good financial conditions and good faith can be saved from bankruptcy.

Keywords: *Bankruptcy, Bankruptcy Terms, Insolvency Test.*